



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021



Drs. H. M. Sanusi, M.M.
Bupati Malang



Drs. H. Didik Gatot Subroto, S.H., M.H.
Wakil Bupati Malang



RLPPD 2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bimbingannya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dirangkum dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sebagai bentuk pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat yang mencakup gambaran dan penjelasan atas seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu tahun 2021, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Selanjutnya kami berharap dengan penyampaian RLPPD ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Ihdinashirotolmustaqim,

Wabillahitaufiq wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kabupaten Malang Tahun 2021 ini memberikan gambaran dan penjelasan atas seluruh realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang kurun waktu tahun 2021, baik dalam hal capaian keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IV, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan / atau media elektronik.

Ringkasan LPPD menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu kami sampaikan ringkasan LPPD sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian serta sinkronisasinya dengan penerapan kebijakan pemerintah maka beberapa indikator makro Kabupaten Malang Tahun 2017-2021 mengalami deviasi sesuai dengan rencana jangka menengah yang sudah ditetapkan. Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam memperkirakan kondisi makro ekonomi Kabupaten Malang adalah pada strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2017-2021 dimaksud yang pada amanahnya menggariskan tiga strategi umum, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan;
2. Mengoptimalkan potensi sektor pariwisata;
3. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup.

Analisis Pola Pikir dan pertimbangan-pertimbangan lain tersaji pada dokumen Studi Perencanaan Kebijakan Ekonomi Makro dalam mengakselerasikan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kabupaten

Malang tahun 2017-2021. Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Malang dengan beberapa indikator makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Malang

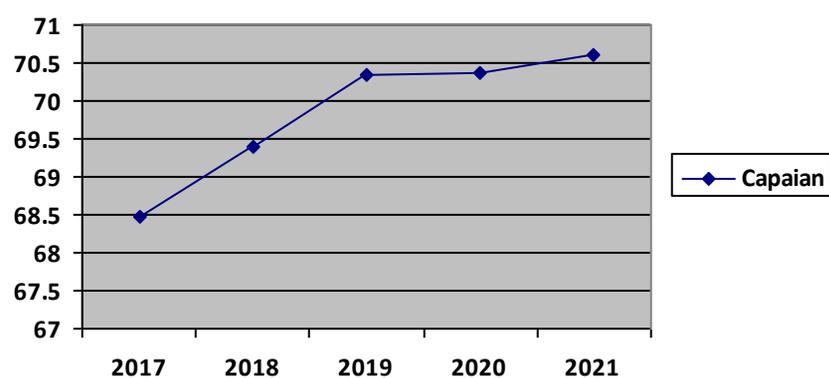
Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	70,36	70,60	0,341
ANGKA KEMISKINAN	10,15	10,50	3,448
ANGKA PENGANGGURAN	5,49	5,40	-1,639
PERTUMBUHAN EKONOMI	-2,68	3,12	216.418
PENDAPATAN PER KAPITA	38,5	40,11	4,132
KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)	0,371	0,367	- 1,078

Sumber : BPS Kabupaten Malang

1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kondisi Pembangunan Manusia Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang mencapai 70,60 persen. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ini disebabkan mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021

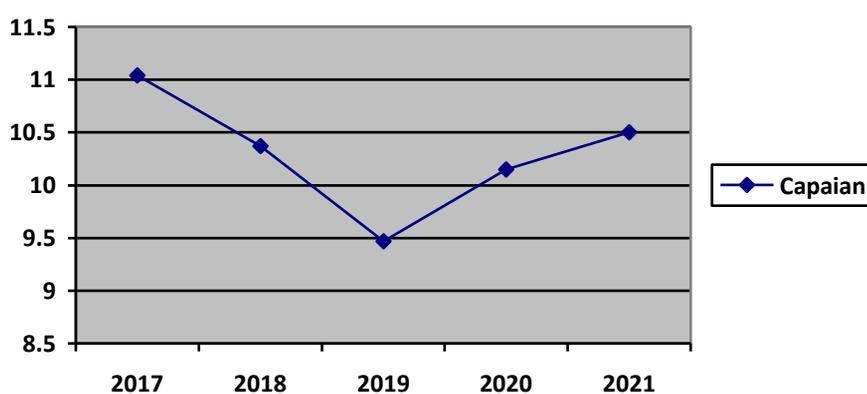


Sumber: BPS Kabupaten Malang

2. ANGKA KEMISKINAN

Angka Kemiskinan pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Malang senantiasa mengalami trend yang signifikan menurun berada pada level 9,47 persen, namun pada Tahun 2020 hingga Tahun 2021 angka kemiskinan mengalami kenaikan hingga level 10,50 persen. Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Malang sebagai berikut:

**Angka Kemiskinan Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021**

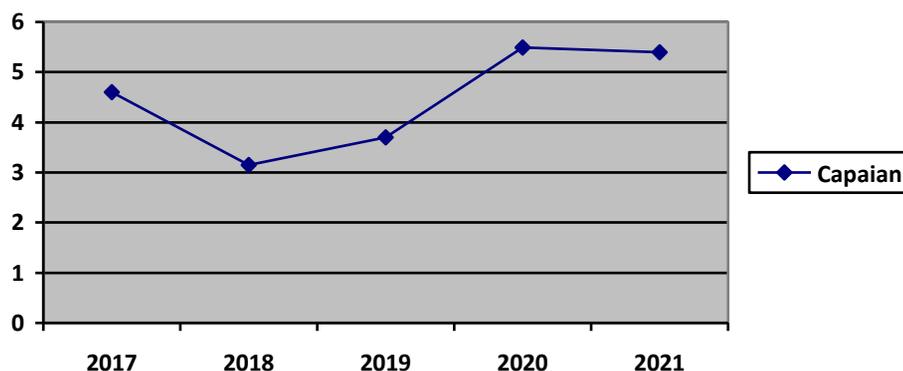


Sumber: BPS Kabupaten Malang

3. ANGKA PENGANGGURAN

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh Pemerintah Daerah maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kondisi tingkat pengangguran di Kabupaten Malang sebagai berikut ini:

**Angka Pengangguran Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Kabupaten Malang

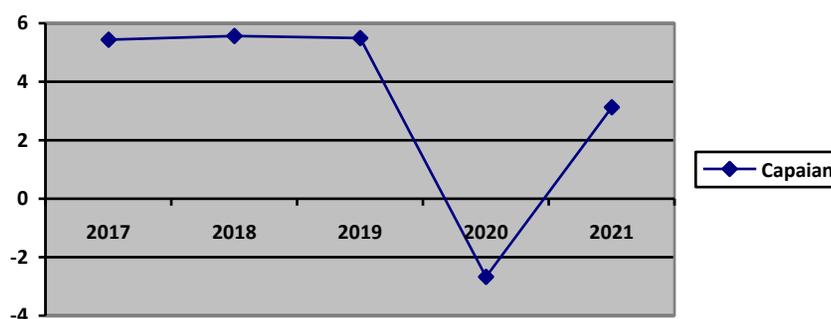
Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 5 (lima) tahun Angka Pengangguran Kabupaten Malang mengalami penurunan hingga pada level 3,15 persen pada Tahun 2018, namun pada Tahun 2019 berada pada level 3,70 persen dan pada Tahun 2020 berada pada level 5,49 persen dan mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2021 pada level 5,40. Hal ini disebabkan karena banyaknya angka usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Malang masih perlu menambah peluang kerja salah satunya dengan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah serta komitmen pemerintah Kabupaten Malang dalam mempermudah investasi.

4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malang dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berikut capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Kabupaten Malang

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Malang senantiasa mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang pada Tahun 2017 sebesar 5,43 persen, Tahun 2018 sebesar 5,56 persen, Tahun 2019 menjadi 5,5 persen dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -2,68 persen. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 3,12. Pencapaian ini merupakan upaya pemerintah yang membangkitkan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid-19.

5. PENDAPATAN PER KAPITA

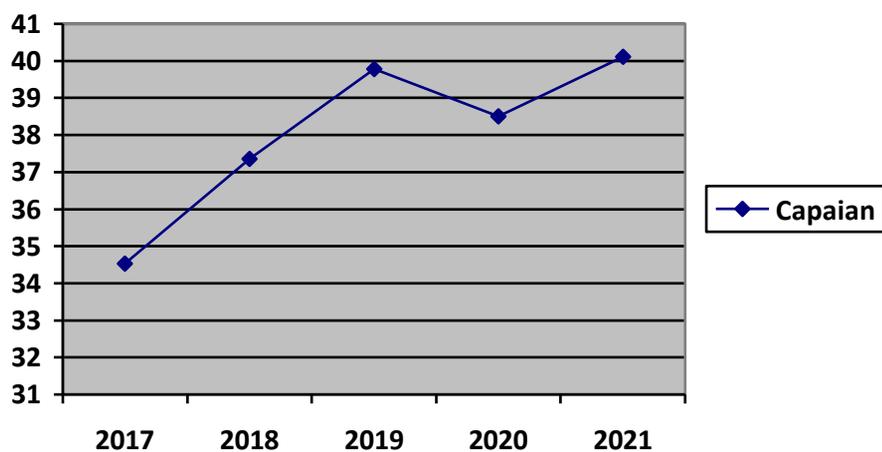
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator perhitungan untuk mengkaji tingkat Pertumbuhan Ekonomi pada suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto terbagi dalam dua kategori utama, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga konstan (ADHK).

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Melalui perhitungan PDRB dapat diketahui struktur perekonomian suatu daerah, laju pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi di level produsen. Perbandingan Produk Domestik Regional Bruto antar wilayah dapat menunjukkan dimana posisi kekuatan ekonomi daerah tersebut.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Malang ini menggunakan jenis metode Produk Domestik Regional Bruto langsung dengan pendekatan produksi (lapangan usaha), karena mampu mengukur besaran nilai tambah dari input menjadi output pada setiap sektor ekonomi. Pendekatan ini juga dapat menjadi dasar evaluasi dalam identifikasi kondisi eksisting berikut strategi pengembangan setiap sektor ekonomi.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Malang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Akibat adanya pandemic covid-19, pertumbuhan per kapita Kabupaten Malang (PDRB per Kapita) mengalami penurunan pada tahun 2020 yang berada pada angka 38,50 juta rupiah. Berkat upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah setelah pandemi covid-19, Kabupaten Malang mampu meningkatkan pendapatan per kapitanya hingga mencapai 40,11 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Malang sebagai berikut:

**Pendapatan Perkapita Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Kabupaten Malang

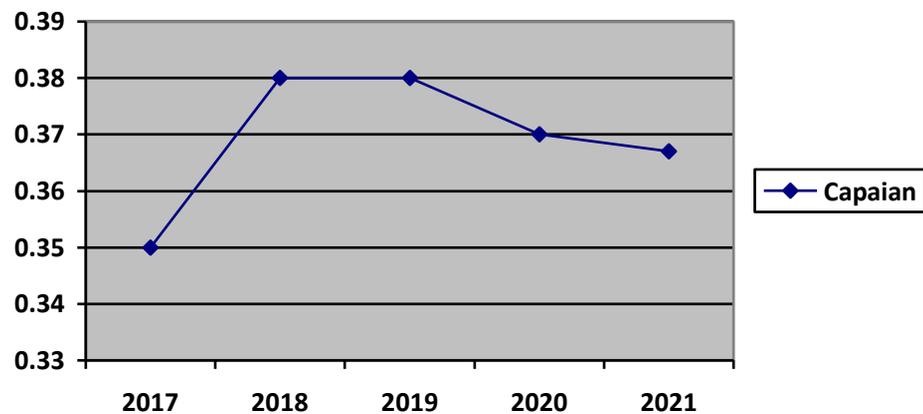
6. KETIMPANGAN PENDAPATAN

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan yaitu Indeks Gini/ Gini Rasio. Indeks Gini adalah satu ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai Indeks Gini nol artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna.

Faktor Penyebab Distribusi Pendapatan Tidak Merata (ketimpangan distribusi pendapatan). Adapun Gini Rasio Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

**Gini Rasio Kabupaten Malang
Tahun 2017-2021**



Sumber: BPS Kabupaten Malang

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

- Penjelasan Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	90,40 %	Dinas Pendidikan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	712	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	92.105	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	92.105	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1.697	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah pendidik pada PAUD	6.167	Dinas Pendidikan	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	2.117	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	1.123	Dinas Pendidikan	

- b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,43 %	Dinas Pendidikan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	1.455	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	242.150	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	122.736	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	242.150	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	122.736	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.811	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.039	Dinas Pendidikan	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	9.748	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.747	Dinas Pendidikan	
10	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1174	Dinas Pendidikan	
11	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	458	Dinas Pendidikan	
12	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	699	Dinas Pendidikan	
13	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	778	Dinas Pendidikan	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	9.031	Dinas Pendidikan	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.393	Dinas Pendidikan	
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	843	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	273	Dinas Pendidikan	
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	399	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	458	Dinas Pendidikan	

c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	81,02 %	Dinas Pendidikan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	1.455	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	242.150	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	122.736	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	242.150	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	122.736	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.811	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3.039	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	9.748	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.747	Dinas Pendidikan	
10	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD	1174	Dinas Pendidikan	
11	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP	458	Dinas Pendidikan	
12	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	699	Dinas Pendidikan	
13	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	778	Dinas Pendidikan	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	9.031	Dinas Pendidikan	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.393	Dinas Pendidikan	
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	843	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	273	Dinas Pendidikan	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	399	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	458	Dinas Pendidikan	

- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Dinas Pendidikan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	23	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.292	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3.292	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	88	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	88	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	64	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	843	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	18	Dinas Pendidikan	

2. Urusan Kesehatan

a. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,09 %	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	23	Dinas Kesehatan	

b. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	60,87 %	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	23	Dinas Kesehatan	

c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,17	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8.013.188	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	707	Dinas Kesehatan	

d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

• Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97,21 %	Dinas Kesehatan	

• Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9185	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standart	1471	Dinas Kesehatan	

e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

• Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,16 %	Dinas Kesehatan	

• Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	8530	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1471	Dinas Kesehatan	

f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

• Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	95,01 %	Dinas Kesehatan	

• Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	56706	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	756	Dinas Kesehatan	

- g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80,26%	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1308	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	507	Dinas Kesehatan	

- h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	30,10%	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	787	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	78	Dinas Kesehatan	

- i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62,48 %	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	507	Dinas Kesehatan	

- j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16,39 %	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.895.966	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	78	Dinas Kesehatan	

- k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	63,44%	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.421592	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	78	Dinas Kesehatan	

- l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	99,34	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	873.638	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	39	Dinas Kesehatan	

m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	99,42 %	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	29.000	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	307	Dinas Kesehatan	

n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	65,79 %	Dinas Kesehatan	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	21.022	Dinas Kesehatan	
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	308	Dinas Kesehatan	

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PU SDA	Dinas PUSDA lebih fokus menangani Sumber Daya Air (irigasi) dan daya rusak sumber daya air

• Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PU SDA	Bukan kewenangan Pemda
2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PU SDA	
3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PU SDA	
4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PU SDA	
5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU SDA	
6.	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU SDA	
7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PU SDA	

- b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

• Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PU SDA	Tidak termasuk kewenangan Pemda

• Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PU SDA	Tidak termasuk kewenangan Pemda
2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	Dinas PU SDA	
3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PU SDA	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PU SDA	
5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU SDA	
6.	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PU SDA	
7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PU SDA	

- c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100 %	Dinas PU SDA	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	100 %	Dinas PU SDA	
2.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam	100 %	Dinas PU SDA	
3.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100 %	Dinas PU SDA	

- d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	97,40 %	Dinas PU SDA	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada	Dinas PU SDA	
2.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PU SDA	
3.	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggaraan SPAM (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PU SDA	
4.	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	Dinas PU SDA	Belum ada kerjasama
5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Tidak ada	Dinas PU SDA	Belum ada kerjasama

e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	81,65 %	Dinas PKPCK	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	598382	Dinas PKPCK	
2.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	8502	Dinas PKPCK	
3.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	606884	Dinas PKPCK	
4.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	4274	Dinas PKPCK	
5.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PKPCK	
6.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	Dinas PKPCK	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
7.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	81,65	Dinas PKPCK	
8.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Dinas PKPCK	
9.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas PKPCK	
10.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	80,51%	Dinas PKPCK	
11.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100	Dinas PKPCK	
12.	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PKPCK	
13.	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	100 %	Dinas PKPCK	
14.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	50,25 %	Dinas PKPCK	

f. Rasio kepatuhan IMB kab/kota

• Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100 %	DPMPTSP	

• Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		Dinas PKPCK	Belum menghitung
2.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalatahun eksisting		DPMPTSP	
3.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)		DPMPTSP	
4.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)		DPMPTSP	
5.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Dinas PKPCK	Belum ada penetapan
6.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah		Dinas PKPCK	Belum ada penetapan
7.	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Dinas PKPCK	
8.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat		Dinas PKPCK	

g. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

• Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	72,60 %	PU Bina Marga	

• Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1.668.762	PU Bina Marga	
2.	Panjang jalan yang dibangun	0	PU Bina Marga	Belum ada jalan yang dibangun
3.	Panjang jembatan yang dibangun	100	PU Bina Marga	
4.	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	46.491	PU Bina Marga	
5.	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	66,7	PU Bina Marga	
6.	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	71.567	PU Bina Marga	
7.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	22,6	PU Bina Marga	
8.	Panjang jalan yang dipelihara	173.000	PU Bina Marga	
9.	Panjang jembatan yang dipelihara	105	PU Bina Marga	

h. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

• Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	

• Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah Pelatihan Tenaga Operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	Tidak melaksanakan pelatihan
2.	Jumlah tenaga kerja Operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1225	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	
3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi Operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1225	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	
4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	1530	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	
6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1530	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	
7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1530	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	Tidak ada informasi potensi pasar jasa konstruksi
8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	
9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	
10.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	0	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	Tidak ada data dan informasi pelatihan
11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	1225	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	
12.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	1225	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	
13.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		DPMPTSP	Tidak melaksanakan pembinaan
14.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		DPMPTSP	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
15.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		DPMPTSP	
16.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tersedia	DPKPCK	Tidak ada kecelakaan konstruksi
17.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		DPMPTSP	Tidak melaksanakan kegiatan
18.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		DPMPTSP	
19.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		DPMPTSP	Tidak dapat disajikan karena melalui system OSS
20.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		DPMPTSP	
21.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		DPMPTSP	Tidak melaksanakan pembinaan
22.	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		DPMPTSP	
23.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		DPMPTSP	Tidak melaksanakan kegiatan
24.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	Tidak ada kecelakaan konstruksi
25.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		DPKPCK, Bina Marga, PUSDA	Tidak melaksanakan kegiatan

- i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	Dinas DPKPCK	Tidak ada kecelakaan konstruksi

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Dinas PKPCK	DPKPCK sebagai verifikator BNPB selama terjadi bencana alam

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas PKPCK	DPKPCK sebagai verifikator BNPB selama terjadi bencana alam
2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas PKPCK	
3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas PKPCK	
4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PKPCK	
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PKPCK	
6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PKPCK	
7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas PKPCK	
8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas PKPCK	
9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas PKPCK	

- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

• Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0	Dinas PKPCK	Belum ada pendataan/identifikasi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

• Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKPCK	Belum ada pendataan/identifikasi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKPCK	
3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKPCK	
4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKPCK	
5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PKPCK	
6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas PKPCK	

- c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani

• Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	2,82 %	Dinas PKPCK	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	37,91	Dinas PKPCK	
2.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1461	Dinas PKPCK	
3.	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1.10	Dinas PKPCK	

d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,59 %	Dinas PKPCK	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah rumah di kab/kota	748.486	Dinas PKPCK	
2.	Jumlah unit PK RTLH	727.622	Dinas PKPCK	
3.	Jumlah rumah tidak layak huni	11.907	Dinas PKPCK	
4.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PKPCK	Belum ada pendataan
5.	Rasio rumah dan KK	1,17 %	Dinas PKPCK	
6.	Jumlah rumah pembangunan baru	6167	Dinas PKPCK	

e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	Dinas PKPCK	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	153.653	Dinas PKPCK	
2.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	153.653	Dinas PKPCK	
3.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	153.653	Dinas PKPCK	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	153.653	Dinas PKPCK	
5.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	9	Dinas PKPCK	
6.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	153.653	Dinas PKPCK	
7.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	21	Dinas PKPCK	
8.	Jumlah pengembang yang terregistrasi	519	Dinas PKPCK	
9.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PKPCK	

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Sat Pol PP	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	1.714	Sat Pol PP	
2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	900	Sat Pol PP	
3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	15	Sat Pol PP	
4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	3	Sat Pol PP	
5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Sat Pol PP	
6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Sat Pol PP	

b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	Sat Pol PP	

- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.635.950	BPBD	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	BPBD	
2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	BPBD	

- d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15.361	BPBD	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	Surat Pernyataan
2.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 %	BPBD	
3.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 %	BPBD	
4.	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	100 %	BPBD	
5.	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 %	BPBD	
6.	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	

- e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	635214	BPBD	Dokumen RPB belum ada

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		BPBD	
2.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	BPBD	
3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %	BPBD	
4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0	BPBD	

- f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Sat Pol PP	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	73	Sat Pol PP	
2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tidak ada	Sat Pol PP	Surat Pernyataan
3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tidak ada	Sat Pol PP	Surat Pernyataan
4.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana / prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Tidak ada	Sat Pol PP	Surat Pernyataan

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	267	Sat Pol PP	
6.	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	7	Sat Pol PP	
7.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	11	Sat Pol PP	
8.	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	7	Sat Pol PP	

g. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	22,4 menit	Sat Pol PP	

7. Urusan Sosial

a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	0,69 %	Dinas Sosial	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	5	Dinas Sosial	
2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	121.097	Dinas Sosial	
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	9	Dinas Sosial	
4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	121.097	Dinas Sosial	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinas Sosial	
6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0	Dinas Sosial	
7.	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	71	Dinas Sosial	
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	100	Dinas Sosial	
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial	
11.	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial	
12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial	
13.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial	
14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	33	Dinas Sosial	
15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	610	Dinas Sosial	
16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	3	Dinas Sosial	
17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinas Sosial	Tidak ada penyandang disabilitas yang difasilitasi
18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	11	Dinas Sosial	

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2	Dinas Sosial	
20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	2	Dinas Sosial	
21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	17	Dinas Sosial	

- b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

- Penjelasan IKK Outcome

No	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	Dinas Sosial	

- Penjelasan IKK Output

No	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	473	Dinas Sosial	
2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	
3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial	
4.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial	
5.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial	
6.	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	99	Dinas Sosial	

C. HASIL EVALUSAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil Evaluasi EPPD

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2016 yaitu dengan skor 3,5126 atau dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi**;
- b. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2017 yaitu dengan skor 2,8128 atau dengan kategori prestasi **Tinggi**;
- c. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2018 yaitu dengan skor 3,7800 atau dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi**;
- d. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 masih dalam tahap penilaian;

- e. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malang Tahun 2020 masih dalam tahap penilaian.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malang oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Opini laporan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH
1	Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2016 sampai dengan 2021 laporan keuangan Kabupaten Malang dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Target Dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran

2020 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 228 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 191 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Tahun Anggaran 2020, maka pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang sah, yang ditargetkan sebesar Rp **3.968.097.682.828,00** dengan realisasi sebesar Rp. **4.089.108.052.539,91** atau **103,05%**.

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. **Adapun Data dimaksud telah di reviu oleh Inspektorat Daerah namun masih belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan rincian sebagai berikut :**

**Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan
Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	741.747.683.247,00	669.361.940.836,91	90,24
2.	Pendapatan Transfer	3.023.556.099.581,00	3.155.933.221.902,00	104,38
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	202.793.900.000,00	262.812.889.801,00	130,09
Jumlah		3.968.097.682.828,00	4.089.108.052.539,91	103,02

Sumber : BKAD Kab Malang

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD belum mencapai target yang diharapkan. Realisasi PAD Tahun 2021 realisasi sebesar Rp 669.361.940.836,91 atau mencapai 90,24%

dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 583.846.309.201,31 maka terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp 85.515.631.635,91 atau 87,22%. Untuk Pendapatan Transfer tahun anggaran 2021 realisasinya sebesar Rp 3.155.933.221.902,00 atau 104,38% dari target yang direncanakan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 2.563.781.806.127,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp 592.151.415.775,00 atau 81,24%. Sedangkan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2021 realisasinya sebesar Rp 262.812.889.801,00 atau 130,09% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 665.449.295.106,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 392.636.405.305,00 atau 253,20%.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 18,69% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2021, sedangkan Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar yaitu 76,19% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5,11%.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 741.747.683.247,00 dan dapat direalisasikan lebih kecil dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp 669.361.940.836,91 atau mencapai 90,24%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Malang berasal dari Hasil Pajak Daerah, yaitu mencapai 102,88% dari target. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perincian Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Hasil Pajak Daerah	312.640.185.062,00	321.636.997.342,00	102,88
2	Hasil Retribusi Daerah	34.604.571.750,00	32.025.994.927,00	92,55
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.068.612.020,00	20.593.539.140,25	102,62
4	Lain Lain Pendapatan yang sah	374.434.314.415,00	295.105.409.427,00	78,81
Jumlah		741.747.683.247,00	669.361.940.836,91	90,24

Sumber : BKAD Kab Malang

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melampaui target, relatif lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2021 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer terdiri atas:
 1. Transfer Pemerintah Pusat
 2. Transfer antar-daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD. Penerimaan dari Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 3.023.556.099.581,00 dan terealisasi sebesar

Rp 3.155.933.221.902,00 atau mencapai target 104,37%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perincian Realisasi Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.784.595.053.164,00	2.782.093.459.127,00	99,95
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	238.961.046.417,00	372.839.762.775,00	156,03
Jumlah		3.023.556.099.581,00	3.155.933.221.902,00	104,38

Sumber : BKAD Kab Malang

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 202.793.900.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 268.812.889.801,00 atau mencapai 130,09%. Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	9.000.000.000,00	46.617.596.860,00	517,97
2	Pendapatan lainnya	193.793.900.000,00	217.195.292.941,00	112,08
Jumlah		202.793.900.000,00	262.812.889.801,00	130,09

Sumber : BKAD Kab Malang

2. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya

merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang:

Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp 4.294.060.435.297,00 dan dapat direalisasikan Rp 3.873.259.529.832,05 atau mencapai 90,20%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	3.149.044.883.300,00	2.783.635.478.465,55	88,40
2	Belanja Modal	478.381.038.438,00	438.420.321.805,50	91,65
3	Belanja Tidak Terduga	56.636.738.053,00	41.412.951.108,00	73,12
4	Belanja Transfer	609.997.775.506,00	609.790.778.453,00	99,97
Jumlah		4.294.060.435.297,00	3.873.259.529.832,05	90,20

Sumber : BKAD Kab Malang

Jika dilihat dari komposisinya, belanja operasi memberikan kontribusi sebesar 88,40% dari realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2021 sedangkan belanja modal sebesar 91,65%, belanja tidak terduga sebesar 73,12% dan belanja transfer sebesar 99,97%. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2021, dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari – hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. dianggarkan sebesar Rp 3.149.044.883.300,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.783.635.478.465,55 atau 88,40% dengan rincian pada tabel berikut:

**Perincian Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.607.342.564.854,00	1.460.243.334.123,94	90,85
2	Belanja Hibah	142.384.555.010,00	133.354.983.216,30	93,65
3	Belanja Bantuan Sosial	71.911.470.000,00	69.658.057.000,00	96,87
4	Belanja Barang dan Jasa	1.327.406.293.436,00	1.120379.104.125,31	84,40
Jumlah		3.149.044.883.300,00	2.783.635.478.465,55	88,40

Sumber : BKAD Kab Malang

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. dianggarkan sebesar Rp 478.381.038.438,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 438.420.321.805,50 atau 91,65% dengan rincian pada tabel berikut:

**Perincian Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	6.796.308.754,00	6.082.754.991,00	89,50
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.838.616.718,00	144.362.447.463,26	97,65

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.939.066.698,00	54.181.145.874,00	91,93
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.214.736.882,00	205.923.806.202,00	87,55
5	Belanja Aset Tetap lainnya	29.178.309.386,00	27.529.642.875,24	94,35
6	Belanja Aset Lainnya	417.000.000,00	340.524.400,00	81,66
Jumlah		478.381.038.438,00	438.420.321.805,50	91,65

Sumber : BKAD Kab Malang

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. dianggarkan sebesar Rp 56.636.738.053,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 41.412.951.180,00 atau 73,12% dengan rincian pada tabel berikut:

Perincian Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Terduga	56.636.738.053,00	41.412.951.180,00	73,12
Jumlah		56.636.738.053,00	41.412.951.180,00	73,12

Sumber : BKAD Kab Malang

Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. dianggarkan sebesar Rp 609.997.775.506,00 dan dapat

direalisasikan sebesar Rp 609.790.778.453,00 atau 99.97% dengan rincian pada tabel berikut:

**Perincian Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil	27.275.200.271,00	27.068.233.218,00	99,24
2	Belanja Bantuan Keuangan	582.722.575.235,00	582.722.545.235,00	100,00
Jumlah		609.997.775.506,00	609.790.775.275,00	99,97

Sumber : BKAD Kab Malang

E. INOVASI DAERAH

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/571/KEP/35.07.013/2021 tentang Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019-2021. Tujuan Inovasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui kualitas pelayanan publik.

Berikut daftar inovasi pelayanan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang tahun 2021 sebagai berikut:

**Data Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tahun 2021**

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1	SIMONI (Sistem Informasi Monitoring Pajak Daerah)	Badan Pendapatan Daerah

No	Perangkat Daerah	Judul Inovasi
2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	e-Intan
3	Badan Komunikasi dan Informatika	Pemilihan Duta Informasi
4	Badan Komunikasi dan Informatika	SISKEUDES ONLINE (Sistem Keuangan Desa Online)
5	Dinas Lingkungan Hidup	Budidaya Magot dari Sampah Organik
6	Dinas Pendidikan	SIAP PPDB ONLINE
7	Dinas Perikanan	Budidaya Mina Holtikultura (Kawasan Wisata Edukasi)
8	Dinas Perikanan	Bank Ikan Lokal Jawa Timur sebagai Kawasan Konservasi Perairan Umum
9	Dinas Perikanan	Kawasan Konservasi Ikan Lokal Sungai Brantas (Kalirejo)
10	Dinas Perikanan	Wisata Edukasi Konservasi Penyu (Pantai Bajol Mati)
11	Dinas Perikanan	Wisata Edukasi Konservasi Terumbu Karang (Purwodadi)
12	Dinas Perikanan	Aplikasi Pelelangan Ikan dan Pelaporan PAD Retribusi TPI
13	Dinas Perikanan	Aplikasi Ketersediaan Ikan dan Harga Ikan
14	Dinas Perikanan	Aplikasi Promosi Produk Perikanan
15	Dinas Perikanan	Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pengelolaan Limbah Organik Ruma Potong Hewan dengan Budidaya Magot
17	Kecamatan Donomulyo	YANTO (Pelayanan Nonstop)
18	Kecamatan Wajak	PAK TARSO (Pelayanan Kecamatan Diantar ke Deso)
19	Dinas Pendidikan	E-KGB (Elektronik Kenaikan Gaji Berkala)

Sumber : Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/571/KEP/35.07.013/2021